

TAJUK RENCANA

Pendidikan, Mundur Lagi

AKHIRNYA mulai Selasa (22/6) kemarin, peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro diberlakukan secara nasional. Sementara Gubernur DIY, selain siap melaksanakan instruksi Pusat, juga memastikan tidak akan melakukan langkah *lockdown*, karena beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah karena masalah pembiayaan. (KR 22/6).

Meski ancaman *lockdown* adalah opsi terakhir. Mengingat lonjakan angka yang terpapar Covid-19 tak terbendung bahkan jumlahnya bertambah terus. Namun PPKM Mikro tentu saja berdampak pada banyak sektor. Yang paling terasa adalah sektor pariwisata dan pendidikan. Selain sektor ekonomi yang akan makin anjlok.

Seperti kita ketahui, Presiden Jokowi sebelumnya sudah menyatakan kemungkinan bulan Juli sudah bisa dimulai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk siswa. Ini dikatakan ketika kasus Covid-19 mulai landai, datar tidak banyak lonjakan. Dunia pendidikan punya harapan baru, menjadi lebih 'hidup' lagi, khususnya di DIY. Bahkan menurut Sofyan Setyo Darmawan Sekretaris Konmisi D DPRD DIY, banyak sekolah di DIY yang sudah mempersiapkan diri menyambut PTM. Bukan sekadar sarana sarana dan prasarana, namun prosedur bagi guru, siswa dan orangtua siswa untuk bisa tertib melakukan PTM. Pemerintah juga gencar melakukan vaksinasi bagi guru dan petugas sekolah. Semuanya untuk mendukung rencana bulan Juli.

Namun semua rencana tersebut batal. Lantaran PPKM Mikro yang mulai dilakukan pemerintah. Apalagi tren kasus positif Covid-19 ternyata menunjukkan kenaikan di berbagai daerah. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS), dari beberapa sampel

kasus Covid-19, salah satunya sampel anak guna mengetahui keterkaitannya varian B.1617.2 atau delta (KR 22/6). Pemeriksaan dilakukan dengan sampel wilayah Solo Raya, DIY dan DKI Jakarta.

Menurut Ketua Kelompok Kerja Genetik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKMKM) UGM, dr Gunadi SpBA, tren kasus Cavid-19 yang mengalami lonjakan dimungkinkan karena varian Delta. Sampel anak-anak untuk usia di bawah 5 tahun, dan di atas 5 hingga 18 tahun. Maka implikasinya adalah anak-anak justru bisa menjadi sumber penularan kepada orang tuanya yang belum divaksin.

Karena itulah membuka sekolah untuk PTM masih rawan. Vaksinasi untuk guru menurut survei Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) , baru 47, 67% yang menerima sosialisasi program vaksinasi. Sehingga 52, 33% guru belum pernah menerima pengetahuan vaksin. Karena ternyata masih banyak guru yang menolak divaksin karena khawatir.

Melaksanakan PTM, tentu harus berdasarkan pada kesiapan infrastruktur kesehatan sekolah dan kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan. Hasil pengawasan kesiapan pembukaan sekolah, menurut Komisi Perlindungan Anak pada Juni 2021 di 49 sekolah pada 8 kabupaten/kota , hanya 16,3 persen sekolah yang sudah siap dibuka. Sementara data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan baru 280.372 atau 52,44% yang mengisi daftar kesiapan PTM, baru 10% yang siap.

Nah, salah siapa ini? Semua dikembalikan masyarakat untuk bisa tertib melaksanakan protokol kesehatan. Pemerintah juga musti lebih tegas lagi, menjaga disiplin proses. Jadi marilah kita menata semuanya, agar pandemi segera berakhir dan kehidupan kembali menjadi 'normal baru'.
(***)

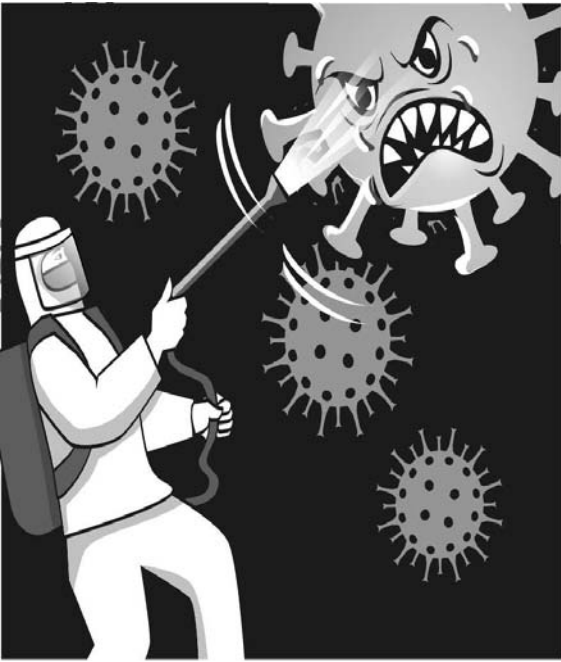
Memutus Rantai Lonjakan Covid

M Iqbal Birsyada

WACANA *lockdown* yang viral diberbagai media sosial, cetak maupun elektronik cukup membuat sebagian masyarakat DIY panik dan was-was (KR/19/6). Jika kebijakan ini benar-benar diberlakukan, akan berimbas buruk khususnya bagi perkembangan industri pariwisata, perdagangan dan perhotelan. . Terlebih belum adanya sebuah sistem terpadu sebagai solusi yang dianggap paling ‘cespleng’ dari pemerintah daerah untuk memutus lonjakan kasus Covid-19 di wilayah ini.

Seakan ‘maju kena mundur kena. Selain belum memiliki sistem kesiapsiagaan terpadu, memberlakukan pembatasan secara total dan ketat akan menyebabkan pendapatan masyarakat menurun drastis. Walaupun sosialisasi proses, pemberian vaksin dan menahan diri untuk mengurangi mobilitas terus dilakukan namun faktanya risiko penularan masih terus naik bahkan trend-nya malah meningkat.

Benar apa yang disampaikan Sultan HB X. Mau tidak mau masyarakat semua harus andil aktif ambil bagian menyudahi penularan covid. (KR/21/6). Sebab hampir tidak mungkin pemerintah daerah membiayai seluruh kehidupan masyarakat jika *lockdown* total benar-benar harus diberlakukan.



Data Terkini

Kepala Bagian Humas Pemda DIY menyampaikan ada tambahan sebanyak 665 kasus terdiri dari 249 Kabupaten Bantul, 234 dari Sleman, 81 Kota Yogyakarta, 53 Kulonprogo dan 48 Gunungkidul (KR,20/6). Dengan rata-rata kasus positif perhari antara 500-600 pasien maka angka tersebut menunjukkan penambahan kasus yang masih tinggi, walaupun ada catatan 280 kesembuhan kasus dan 15 kasus meninggal dunia. Berbagai cara telah ditempuh pemerintah seperti menambah ketersediaan tempat tidur pasien dan menambah tenaga kesehatan. Tidak hanya di bidang pariwisata dan kesehatan saja, lonjakan

baran Covid-19 di lingkungan sekolah di antaranya di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo. Dampak dari kebijakan ini juga sangat kompleks khususnya bagi peserta didik dan orangtua siswa.

Paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menekan penularan Covid-19 khususnya di wilayah DIY. Pertama adalah bangun terus menerus kesadaran dan komunikasi masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Dengan demikian harapannya akan timbul rasa toleransi sesama anggota masyarakat. Misalnya dengan selalu mengingatkan untuk mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Singkatnya perlu ‘rekonstruksi’ kesadaran masyarakat dari level atas

sampai RT. Jadi, yang direkonstruksi adalah pengetahuan, pemahaman masyarakat akan ketaatan protokol kesehatan.

Kedua, perlu kerja sama antara pemerintah daerah, organisasi sosial masyarakat keagamaan, komunitas, LSM, Desa dengan masyarakat secara kolektif bersama-sama secara terus menerus sigap tanggap terhadap penanganan Covid-19. Ketiga, perlu diberlakukan sistem terpadu tanggap kesiapsiagaan Covid-19.

Selandia Baru

Untuk membangun kesadaran tersebut barangkali kita dapat mencontoh Selandia Baru yang mana sementara ini menduduki posisi nomer 1 di dunia dalam penanganan Covid-19. Mereka telah menggunakan sistem deteksi peringatan sejak dini tentang penyebaran covid - 19 yang meliputi Level 1-Persiapan Level 2- Pengurangan Level 3-Pembatasan Level 4- Lockdown. Melalui sistem Kesiapsiagaan tersebut masyarakat Selandia Baru dapat memahami dan mematuhi setiap himbauan dan perintah pemerintah.

Hal lain yang dilakukan adalah melarang perjalanan internasional serta melakukan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu yang dilakukan lagi adalah pelacakan dan kepatuhan publik serta pembatasan kegiatan yang ketat seperti melakukan pelacakan kontak

***)Dr Muhammad Iqbal Birsyada MPd, Dosen di FKIP Universitas PGRI Yogyakarta.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Peran Lembaga Keagamaan dalam Vaksinasi

M Nurdin Zuhdi

PROGRAM vaksinasi di Indonesia masih terus berjalan dan masih membutuhkan proses lama. Namun, kegaduhan dan penolakan terhadap vaksin juga masih terus terjadi dan belum bisa diatasi dengan baik. Kesuksesan program vaksinasi di Indonesia sangat dipengaruhi dari literasi dan edukasi yang diterima masyarakat. Di sini, lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI, NU dan Muhammadiyah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membantu pemerintah melaksanakan program vaksinasi. Mereka masih dianggap ‘kiblat’ fatwa masyarakat muslim Indonesia.

Sejauh ini, umat masih percaya fatwa. Sehingga fatwa murni dan independen harus dijaga agar umat tidak kehilangan krisis kepercayaan pada fatwa dan ulama tidak kehilangan Wibawa. Maka terkait vaksinasi, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi dan memproduksi narasi-narasi positif tentang vaksin. Walaupun mungkin terlambat, namun program vaksinasi masih terus berjalan dan masih membutuhkan waktu yang panjang.

Astra Zaneca

Sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No 14 tahun 2021 tentang hukum Vaksin Covid-19 produk Astra Zaneca, pro - kontra muncul di tengah masyarakat. Fatwa MUI terhadap vaksin Astra Zaneca adalah ‘haram-mubah’. Haram karena ditemukan adanya unsur babi di dalamnya, namun bisa (mubah) karena pertimbangan kedauratan, yaitu pandemi Covid-19 yang segera membutuhkan penanganan. Bagi masyarakat awam, khususnya bagi yang belum akrab dengan dunia fikih dan usul fikih, fatwa haram tapi boleh tentu sedikit membingungkan.

Belum mereda pro - kontra fatwa terse-

but, muncul ‘fatwa tandingan’ yang dikeluarkan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (21/3) yang menyatakan bahwa vaksin Astra Zaneca ‘halal-suci’. Halal dan suci karena hasil akhir yang didapat tidak ditemukan unsur haram dan najis. Bagi masyarakat awam, kedua fatwa seolah-olah berbenturan dan membingungkan.

Muhammadiyah sendiri secara resmi belum mengambil sikap atas temuan unsur babi dalam vaksin Astra Zaneca tersebut. Namun Muhammadiyah pada prinsipnya selaras dan sejalan dengan sikap MUI yang tetap memegang kaidah *ushul fiqh* dan *maqashid syariah*. Muhammadiyah juga mendukung independensi MUI dalam mengeluarkan fatwa.

Perbedaan fatwa PWNU Jatim dengan MUI Pusat terletak pada *intifa’* (pemanfaatan) dengan barang najis (babi) untuk keperluan yang berdampak pada maslahat. Keperluan yang dimaksud adalah tripsin babi sebagai media pembuatan vaksin. Tripsin merupakan sebuah bahan yang digunakan untuk memisahkan sel inang virus dengan *micro carier* virus.

MUI berpendapat bahwa zat dari babi yang digunakan sebagai perantara tersebut tidak hilang status najisnya, sekalipun sudah melalui proses sterilisasi (*tathhir*). Sedangkan PWNU Jatim berpendapat bahwa najis dari unsur babi yang telah diproses sedemikian rupa dan sudah berubah zatnya dianggap menjadi suci. Perbedaan keduanya tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya juga menggunakan metode dan sum-

ber referensi yang sama-sama dapat dipertanggungjawabkan.

Dinamika Ijtihad

Adanya perbedaan fatwa tersebut merupakan bentuk dinamika ijtihad yang alamiah terjadi. Fatwa merupakan hasil ijtihad kolektif-institusional. Karena fatwa merupakan produk ijtihad, sehingga kebenaran hukum yang dihasilkan juga bersifat independen. Jika ada keputusan ijtihad yang berbeda dalam satu persoalan yang sama semuanya dihukumi benar menurut keyakinan masing-masing mujtahidnya. Apa lagi ketentuan hukum dari fatwa vaksin tidak mengikat.

Masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih di antara keduanya mana yang terbaik sesuai dengan kondisi dan keyakinan masing-masing. Apa lagi ada kaidah yang menyatakan bahwa *al-ijtihadu la yunqadlu bil ijtihad*, bahwa hasil ijtihad tidak dapat membatalkan hasil ijtihad yang lainnya.

***)Dr M Nurdin Zuhdi, Doktor Studi Islam Universitas Aisyiyah Yogyakarta.**

Pojok KR

PPKM berlaku lagi, pendidikan terdampak.
-- **Penyadaran untuk prokes perlu gencar lagi.**

Tren anak terpapar Covid-19, naik.
-- **Jangan anggap sepele!**

Gerakan restorasi sungai butuh kepedulian.
-- **Jangan hanya kalau pas banjir, baru sibuk.**
Beraksi

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab pereotakan **Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussyahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiw, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa. Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efly Widjono Puro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandrkyk23@yahoo.com, iklandrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Beras/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%